

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Hukum Divestasi Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012)*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Kairupan, David, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Nurmadjito, 2015, *Tanya Jawab Undang-Undang Pelayanan Publik Amanat Negara Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung.
- Panjaitan, Hulman, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- , Anner Mangatur Sianipar, 2007, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat, 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Rokhmatussa'dyah, Ana, Suratman, 2015, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sinamo, Nomensen, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Untung, Hendrik Budi, 2013, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor:144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5063)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16/ Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi

C. Internet

Antaraneews.com, Birokrasi hambat daya saing ekonomi Indonesia, <http://www.antaraneews.com/berita/334795/birokrasi-hambat-daya-saing-ekonomi-indonesia>, 3 September 2016.

Badan Pusat Statistik, “Jumlah dan Distribusi Penduduk”, <http://sp2010.bps.go.id/index.php>, 2 Agustus 2016.

Catatan Kuliah Fakultas Hukum, Hukum Penanaman Modal : Sejarah dan Perkembangan Penanaman Modal, <https://kuliahade.wordpress.com/2010/11/14/hukum-penanaman-modal-sejarah-dan-perkembangan-penanaman-modal/>, 24 Agustus 2016.

Okezone Finance, Investasi Farmasi di Dalam Negeri Kurang Berkembang, <http://economy.okezone.com/read/2016/11/04/320/1532682/investasi-farmasi-di-dalam-negeri-kurang-berkembang> 5 Mei 2017.

OTDA LAW Beberapa Catatan Hukum Praktisi Pemerintahan Daerah, Perijinan dalam kacamata teori ilmu hukum, <http://otdalaw.blogspot.co.id/2009/12/perijinan-dalam-kacamata-teori-ilmu.html>, 6 Agustus 2016.